



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUSTINUS PRASETYO**
2. Jabatan : **KEPALA KPPN SANGGAU**
3. NHK : **186718**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.259.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m²/21 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 603 m²/350 m² di KAB / KOTA KULON PROGO, WARISAN Rp. 1.809.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 52 m²/36 m² di KAB / KOTA KULON PROGO, WARISAN Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **319.000.000**

1. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY/BEBEK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



5. MOTOR, HONDA BEBEK/SUPRA Tahun 2005, WARISAN Rp. 4.000.000
6. MOBIL, DAIHATSU AYLA 1.0 X AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
7. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	53.350.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	19.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.791.486
F. HARTA LAINNYA	Rp.	114.153.971
Sub Total	Rp.	4.779.295.457
III. HUTANG	Rp.	507.365.756
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.271.929.701

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.